

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENAKSIRAN DAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BERITA – ACARA

Nomor:

Pada hari ini tanggal tahun 20...., kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Penilai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: tanggal telah melakukan survei lapangan dan pemeriksaan atas barang inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan hasil sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 20.....

PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI
BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

TIM PENILAI:

1.
Nama :
NIP :
Jabatan :
2.
Nama :
NIP :
Jabatan :
3.
Nama :
NIP :
Jabatan :

MENGETAHUI:

KETUA PANITIA PENAKSIR DAN
PENILAI BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU,

(.....)
NIP.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

FORMAT RINGKASAN HASIL PENAKSIRAN DAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

FORMAT RINGKASAN HASIL PENAKSIR DAN PENILAI

PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RINGKASAN NILAI

Objek Penilaian :

Lokasi Objek Penilaian :

Nama Pemilik :

Luas Tanah/Bangunan :

Jenis Hak :

Pendekatan Nilai :

RINGKASAN NILAI WAJAR

NO.	OBJEK PENILAIAN	LUAS (M2)	NILAI WAJAR (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
TOTAL			

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR USULAN BARANG MILIK DAERAH
 YANG AKAN DINILAI
 TAHUN

SKPD :
 KABUPATEN :

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merk/Type	Dokumen Kepemilikan	Tahun Pembelian	Asal Perolehan	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui:
 KEPALA SKPD

(.....)
 NIP.

Putussibau,
 PENGURUS BARANG,

(.....)
 NIP.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

REKAPITULASI DAFTAR USULAN BARANG MILIK DAERAH
 YANG AKAN DINILAI
 TAHUN

KABUPATEN :

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merk/Type	Dokumen Kepemilikan	Tahun Pembelian	Asal Pembelian	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Putussibau,

KEPALA DPPKAD
 KABUPATEN KAPUAS HULU

(.....)
 NIP.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

FORMAT PENILAIAN ASET TETAP LAINNYA

NO. KODE LOKASI :
 SKPD/UNIT KERJA :

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Buku/ Perpustakaan		Barang Bercorak			Hewan/ Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak/ Pembelian	Asal Usul Perolehan	Harga Awal	Harga Taksiran	Ket.
		Kode Barang	Register	Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Kesenian/ Kebudayaan			Jenis	Ukuran						
						Asal Daerah	Pencipta	Bahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Mengetahui:
 KEPALA SKPD

(.....)
 NIP.

Putussibau,

ANGGOTA TIM PENILAI,

(.....)
 NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Dst..				

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR HASIL PENILAIAN
 BARANG MILIK DAERAH TAHUN

KABUPATEN :

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merk/Type	Dokumen Kepemilikan	Tahun Pembelian/	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Hasil Penilaian Barang	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Putussibau,
 KETUA PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI
 BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

(.....)
 NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Dst..				

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

FORM PENILAIAN : TANAH

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	IDENTITAS OBJEK BMD	
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang
	Luas Tanah	Ditulis dalam satuan per-meter persegi
	Penggunaan	Kantor,Rumah,Tanah Kosong, dll
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
2.	JENIS TANAH	Sesuai kode tanah (dalam Permendagri 17 Th 2007)
3.	ALAMAT ASET	Diisi alamat lengkap dimana aset tersebut berada
4.	DATA PEROLEHAN *)	
	Nomor Surat	Diisi dengan nomor Kuitansi pembebasan tanah
	Tanggal Perolehan	Diisi dengan tanggal Kuitansi pembebasan tanah
	Harga Tanah	Diisi sesuai harga pada Kuitansi pembebasan tanah
	Biaya Pendukung	Diisi jumlah biaya pendukung misal biaya panitia, biaya sertifikat, biaya pengurusan/pematangan, dll.
	Harga Perolehan	Harga Tanah + biaya pendukung (biaya panitia, biaya sertifikat, biaya pengurusan/pematangan, dll).
5.	DATA PENILAIAN ASET TANAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN DATA PASAR *)	
	Nama Bukti Pembanding I	Diisi dengan SPPT/Sertifikat
	Nomor Bukti Pembanding I	Diisi dengan nomor dari SPPT/Sertifikat
	Tanggal Bukti Pembanding I	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Sertifikat
	Harga tanah pembanding I per m ²	Rp.
	Nama Bukti Pembanding II	Diisi dengan SPPT/Sertifikat
	Nomor Bukti Pembanding II	Diisi dengan nomor dari SPPT/Sertifikat
	Tanggal Bukti Pembanding II	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Sertifikat
	Harga tanah pembanding II per m ²	Rp.
	Nama Bukti Pembanding III	Diisi dengan SPPT/Sertifikat
	Nomor Bukti Pembanding III	Diisi dengan nomor dari SPPT/Sertifikat
	Tanggal Bukti Pembanding III	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Sertifikat
	Harga tanah pembanding III per m ²	Rp.
	Harga Penilaian	Diisi dengan mengalikan luas tanah dengan

		nilai rata-rata keenam pembanding
	Dasar Penilaian	Membandingkan 3 (tiga) Harga objek tanah dengan metode pendekatan harga pasar tanah
6.	DATA PENILAIAN ASET TANAH DENGAN MENGGUNAKAN NJOP *)	
	Nama Bukti	Diisi dengan SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti	Diisi dengan nomor dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti	Diisi dengan tanggal dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP tanah pada tahun penilaian per-meter persegi	Rp.
	Harga Penilaian	Diisi dengan mengalikan luas tanah dengan NJOP tanah pada tahun penilaian per-meter persegi
7.	DATA PENILAIAN ASET *) untuk tanah jalan	
	Nama Bukti Pembanding I	Diisi dengan SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding I	Diisi dengan nomor dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding I	Diisi dengan tanggal dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP tanah pembanding I per m ²	Rp.
	Nama Bukti Pembanding II	Diisi dengan SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding II	Diisi dengan nomor dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding II	Diisi dengan tanggal dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP tanah pembanding II per m ²	Rp.
	Nama Bukti Pembanding III	Diisi dengan SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding III	Diisi dengan nomor dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding III	Diisi dengan tanggal dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP tanah pembanding III per m ²	Rp.
	Harg Penilaian	Diisi dengan mengalikan luas tanah dengan nilai rata-rata keenam pembanding
	Dasar Penilaian	Membandingkan 3 (tiga) NJOP tanah
8.	DATA PENILAIAN ASET *) untuk tanah bukan jalan	
	Nama Bukti Pembanding I	Diisi dengan SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding I	Diisi dengan nomor dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding I	Diisi dengan tanggal dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP tanah pembanding I per m ²	Rp.
	Nama Bukti Pembanding II	Diisi dengan SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding II	Diisi dengan nomor dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding II	Diisi dengan tanggal dari SPPT/surat KPP PBB/Ssp PBB

	NJOP tanah pembandingan II per m ²	Rp.
	Nilai rata-rata NJOP per-m ²	Diisi dengan nilai rata-rata pembandingan I dan pembandingan II
	Harga Penilaian	Diisi dengan mengalikan luas tanah dengan nilai rata-rata kedua pembandingan
	Dasar Penilaian	Membandingkan 2 (dua) NJOP tanah
9.	DATA DOKUMEN	
	Nomor Sertifikat/bukti penguasaan	Diisi dengan nomor sertifikat tanah/bukti penguasaan
	Tanggal Sertifikat/bukti penguasaan	Diisi dengan tanggal sertifikat tanah/bukti penguasaan
	Status Hak	Hak Pakai/Hak Pengelolaan *)
	Atas Nama	Diisi dengan nama pemegang hak atas tanah
	Keterangan Dokumen	Catatan keterangan lain
10.	BATAS-BATAS TANAH	Diisi sesuai dengan yang tertera pada sertifikat tanah
11.	KETERANGAN TANAH	
	Diatasnya berdiri	Diisi dengan nama gedung/kantor/tanah kosong,dll
12.	FOTO TANAH	Terlampir

Keterangan:

1. jika terdapat dokumen perolehan lengkap, maka Nomor 4 diisi lainnya tidak.
2. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka penilaian tanah tersebut menggunakan metode penilaian pendekatan data pasar pada tahun penilaian, maka nomor 5 diisi, sedangkan nomor 4, 6 diisi, 7, dan 8 tidak diisi.
3. Jika tidak didapat nilai harga pasar atau penilai tidak dapat menggunakan metode lainnya dalam penilaian aset tanah, maka penilaian menggunakan NJOP pada tanah tersebut pada tahun penilaian, maka nomor 6 diisi, sedangkan nomor 4, 5, 7, dan 8 tidak.
4. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tanah tersebut tidak memiliki NJOP, maka tanah jalan nomor 7 diisi, sedang nomor 4, 5, 6 dan 8 tidak diisi.
5. Jika tanah jalan, maka pembandingan I adalah ujung awal sisi kanan, pembandingan II adalah ujung awal sisi kiri, pembandingan III adalah tengah sisi kanan, pembandingan IV adalah tengah sisi kiri, pembandingan V akhir sisi kanan, pembandingan VI adalah akhir sisi kiri, jadi terdapat 6 (enam) pembandingan.
6. Untuk tanah bukan jalan pembandingan NJOP tanah yang berdekatan yaitu pembandingan I (sisi kanan dengan lokasi tanah) pembandingan II (sisi kiri dengan lokasi tanah).

Mengetahui
Kepala SKPD....

Putussibau,20.....

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Dst..				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

FORM PENILAIAN : PERALATAN DAN MESIN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	IDENTITAS OBJEK BMD	
	Nama dan Jenis Barang	Diisi sesuai dengan nama dan jenis barang pada buku inventaris
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang
	Merk/Type	Diisi dengan merk/ukuran barang
	Ukuran	Diisi dengan ukuran barang
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan barang
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
2.	DATA PEROLEHAN *)	
	Nomor Surat	Diisi dengan nomor kontrak/SPK/Kuitansi
	Tanggal Perolehan	Diisi dengan tanggal kontrak/SPK/Kuitansi
	Harga Kontrak/SPK/Kuitansi	Diisi dengan harga kontrak/SPK/Kuitansi per-satuan barang
	Jumlah Biaya Pendukung	Diisi jumlah biaya pendukung misal perencanaan, pengawasan, biaya lelang, panitia.
	Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan semua biaya pendukung, sehingga barang tersebut siap digunakan seperti: ATK, Fotocopy, Panitia, Biaya Lelang, dll bila ada
	Dasar Harga	Harga perolehan
3.	DATA PENILAIAN ASET *)	
	Nama Bukti	Diisi dengan "Buku Inventaris SKPD A dengan nomor kode dan register dan dilampiri copy data barang
	Harga Perolehan	Diisi sesuai dengan harga barang yang tipenya sama/sejenis
	Dasar Harga	Menggunakan harga barang sejenis/setipenya yang sama saat perolehan
4.	DATA PENILAIAN ASET PERALATAN DAN MESIN KURANG DARI 9 TAHUN*)	
	Nilai Taksiran/Biaya Pembelian baru	Diisi dengan nilai "Biaya Pembelian Baru" yang diambil dai Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud, maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang perolehan dari harga pasar
	Depresiasi (10% x umur peralatan dan mesin)	Diisi dengan nilai depresiasi yaitu 10% x umur barang
	Nilai Aset (Pembelian Baru-Depresiasi)	Diisi dengan mengurangi biaya pembelian baru dengan depresiasi
5.	DATA PENILAIAN ASET PERALATAN DAN MESIN LEBIH DARI 9 TAHUN DAN MASIH DIGUNAKAN*)	
	Nilai Taksiran/Biaya Pembelian baru	Diisi dengan nilai "Biaya Pembelian Baru" yang diambil dai Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud, maka biaya

		pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang perolehan dari harga pasar
	Nilai Aset (Total Taksiran x 10%)	Diisi dengan mengalikan biaya pembelian baru dengan 10%
6.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari Buku Inventaris
7.	FOTO BMD	Terlampir

Keterangan:

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 3, 4 dan 5 tidak diisi.
2. Jika tidak dapat dokumen yang lengkap dan menggunakan harga barang sejenis/setipe, maka Nomor 2, 4 dan 5 tidak diisi.
3. Jika tidak terdapat barang sejenis/setipe di buku inventaris, maka nomor 2 dan 3 tidak perlu diisi. Apabila umur aset tersebut kurang dari 9 tahun, maka yang diisi nomor 4, sedangkan nomor 5 tidak diisi. Apabila umur aset tersebut lebih dari 9 tahun, maka yang diisi nomor 5, sedang nomor 4 tidak diisi.

Mengetahui
Kepala SKPD....

Putussibau,20.....

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Dst..				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

FORM PENILAIAN : KENDARAAN BERMOTOR

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	IDENTITAS OBJEK BMD	
	Nama dan Jenis Barang	Diisi sesuai dengan nama dan jenis barang pada buku inventaris
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi kendaraan
	Merk/Type	Diisi dengan merk/ukuran kendaraan
	Ukuran	Diisi dengan ukuran CC kendaraan
	Nomor Rangka	Diisi dengan Nomor Rangka kendaraan
	Nomor Mesin	Diisi dengan Nomor Mesin kendaraan
	Nomor Polisi	Diisi dengan Nomor Polisi kendaraan
	Nomor STNK	Diisi dengan Nomor STNK kendaraan
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan kendaraan
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
2.	DATA PEROLEHAN *)	
	Nomor Surat	Diisi dengan nomor kontrak/SPK/Kuitansi
	Tanggal Perolehan	Diisi dengan tanggal kontrak/SPK/Kuitansi
	Harga Kontrak/SPK/Kuitansi	Diisi dengan harga kontrak/SPK/Kuitansi per-satuan barang
	Jumlah Biaya Pendukung	Diisi dengan menjumlahkan semua biaya pendukung, sehingga barang tersebut siap digunakan seperti: ATK, Fotocopy, Panitia, Biaya Lelang, dll bila ada
	Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan semua biaya pendukung
3.	DATA PENILAIAN ASET *)	
	Nama Bukti	Keputusan Gubernur Nomor tanggal tentang NJKB
	Harga Penilaian	Diisi sesuai dengan NJKB pada waktu penilaian dari kendaraan bermotor yang bersangkutan
	Dasar Penilaian	Menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
4.	DATA DOKUMEN	
	Nomor BPKB	Diisi dengan nomor BPKB
	Tanggal BPKB	Diisi dengan tanggal BPKB
	Atas Nama	Diisi dengan nama pemilik sesuai BPKB
	Keterangan BPKB	Catat keterangan lain
5.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari Buku Inventaris
6.	FOTO BMD	Terlampir

Keterangan

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 3 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan menggunakan Keputusan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun penilaian, sehingga nomor 2 tidak diisi.

Mengetahui
Kepala SKPD....

Putussibau,20.....

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Dst..				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

FORM PENILAIAN : BANGUNAN DAN GEDUNG

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	IDENTITAS OBJEK BMD	
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang
	Luas Bangunan	Ditulis dalam satuan per-meter persegi
	Penggunaan	Nama gedung/bangunan
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
	Konstruksi	Beton/tidak beton *)
	Fisik	Bertingkat/tidak bertingkat
2.	JENIS GEDUNG	Sesuai kode gedung (dalam Permendagri 17 Th 2007)
3.	ALAMAT ASET	Diisi alamat lengkap dimana aset tersebut berada
4.	DATA PEROLEHAN *)	
	Nomor Surat Kontrak	Diisi dengan nomor kontrak/SPK
	Tanggal Kontrak	Diisi dengan tanggal kontrak/SPK
	Nilai Kontrak	Diisi dengan nilai kontrak/SPK
	Biaya Pendukung	Diisi jumlah biaya pendukung misal perencanaan, pengawasan, biaya lelang, panitia.
	Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan biaya pendukung
5.	DATA PENILAIAN ASET BANGUNAN KURANG DARI 40 TAHUN *)	
	Total Taksiran Biaya Membangun Baru	Diisi dengan luas bangunan x SHBJ membangun baru per-meter persegi
	Depresiasi (2% x umur bangunan)	Diisi dengan umur bangunan dikali 2%
	Nilai Aset (total taksiran-depresiasi)	Diisi dengan Rp total taksiran dikurangi depresiasi
6.	DATA PENILAIAN ASET BANGUNAN LEBIH DARI 40 TAHUN DAN MASIH DIGUNAKAN *)	
	Total Taksiran Biaya Membangun Baru	Diisi dengan luas bangunan x SHBJ membangun baru per-meter persegi
	Nilai Aset (total taksiran x 20%)	Diisi dengan Rp total taksiran dikali 20%
7.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari Buku Inventaris
8.	FOTO BANGUNAN	Terlampir

Keterangan:

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 5 dan 6 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan umur bangunan kurang dari 40 tahun, maka nomor 4 dan 6 tidak diisi.
3. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan umur bangunan lebih dari 40 tahun, maka nomor 4 dan 5 tidak diisi.

Mengetahui
Kepala SKPD....

Putussibau,20.....

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Dst..				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

FORM PENILAIAN : BANGUNAN DAN GEDUNG

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	IDENTITAS OBJEK BMD	
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang
	Luas Bangunan	Ditulis dalam satuan per-meter persegi
	Penggunaan	Nama gedung/bangunan
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
	Konstruksi	Beton/tidak beton *)
	Fisik	Bertingkat/tidak bertingkat
2.	JENIS GEDUNG	Sesuai kode gedung (dalam Permendagri 17 Th 2007)
3.	ALAMAT ASET	Diisi alamat lengkap dimana aset tersebut berada
4.	DATA PEROLEHAN *)	
	Nomor Surat Kontrak	Diisi dengan nomor kontrak/SPK
	Tanggal Kontrak	Diisi dengan tanggal kontrak/SPK
	Nilai Kontrak	Diisi dengan nilai kontrak/SPK
	Biaya Pendukung	Diisi jumlah biaya pendukung misal perencanaan, pengawasan, biaya lelang, panitia.
	Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan biaya pendukung
5.	DATA PENILAIAN ASET BANGUNAN KURANG DARI 40 TAHUN *)	
	Total Taksiran Biaya Membangun Baru	Diisi dengan luas bangunan x SHBJ membangun baru per-meter persegi
	Depresiasi (2% x umur bangunan)	Diisi dengan umur bangunan dikali 2%
	Nilai Aset (total taksiran-depresiasi)	Diisi dengan Rp total taksiran dikurangi depresiasi
6.	DATA PENILAIAN ASET BANGUNAN LEBIH DARI 40 TAHUN DAN MASIH DIGUNAKAN *)	
	Total Taksiran Biaya Membangun Baru	Diisi dengan luas bangunan x SHBJ membangun baru per-meter persegi
	Nilai Aset (total taksiran x 20%)	Diisi dengan Rp total taksiran dikali 20%
7.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari Buku Inventaris
8.	FOTO BANGUNAN	Terlampir

Keterangan:

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 5 dan 6 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan umur bangunan kurang dari 40 tahun, maka nomor 4 dan 6 tidak diisi.
3. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan umur bangunan lebih dari 40 tahun, maka nomor 4 dan 5 tidak diisi.

Mengetahui
Kepala SKPD....

Putussibau,20.....

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Dst..				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

FORM PENILAIAN : JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	IDENTITAS OBJEK BMD	
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang
	Ukuran barang	Ditulis ukuran barang
	Penggunaan	Nama Jalan, Jaringan, Irigasi *)
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
	Konstruksi	Aspal/Beton/tidak beton,dll *)
2.	JENIS JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	Sesuai kode Jalan, Jaringan, dan Jembatan (dalam Permendgari 17 Th 2007)
3.	ALAMAT ASET	Diisi alamat lengkap dimana aset tersebut berada
4.	DATA PEROLEHAN *)	
	Nomor Surat Kontrak	Diisi dengan nomor kontrak/SPK
	Tanggal Kontrak	Diisi dengan tanggal kontrak/SPK
	Nilai Kontrak	Diisi dengan nilai kontrak/SPK
	Biaya Pendukung	Diisi jumlah biaya pendukung misal perencanaan, pengawasan, biaya lelang, panitia.
	Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan biaya pendukung
5.	DATA PENILAIAN ASET *)	
	Nama Bukti	Diisi dengan "Buku Inventaris SKPD A dengan nomor kode barang dan register dan lampiri copy data barang
	Harga Perolehan	Diisi sesuai dengan harga barang yang tipenya sama/sejenis
	Dasar Harga	Menggunakan harga barang sejenis/tipenya sama saat perolehan
6.	DATA PENILAIAN ASET JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI UMUR KURANG DARI 4 TAHUN *)	
	Taksiran Biaya Pembuatan Baru	Diisi dengan nilai "Biaya Pembuatan Baru" yang diambil dari standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian
	Depresiasi (20% x umur bangunan)	Diisi dengan umur bangunan dikali 20%
	Nilai Aset (total taksiran-depresiasi)	Diisi dengan Rp total taksiran-depresiasi
7.	DATA PENILAIAN ASET BANGUNAN LEBIH DARI 4 TAHUN DAN MASIH DIGUNAKAN *)	
	Total Taksiran Biaya membuat baru	Diisi dengan nilai "Biaya Pembuatan Baru" yang diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian
	Nilai Aset (total taksiran x 20%)	Diisi dengan Rp total taksiran x 20%
8.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari Buku

		Inventaris
9.	FOTO JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	Terlampir

Keterangan:

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 5, 6 dan 7 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan, maka yang diisi nomor 5, sedangkan nomor 4, 6 dan 7 tidak diisi.
3. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tidak terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan dan umur bangunan kurang dari 4 tahun, maka yang diisi nomor 6, sedangkan nomor 4, 5 dan 7 tidak diisi.
4. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tidak terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan dan umur bangunan lebih dari 4 tahun, maka yang diisi nomor 7, sedangkan nomor 4, 5 dan 6 tidak diisi.

Mengetahui
Kepala SKPD....

Putussibau,20.....

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Dst..				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

FORM PENILAIAN : ASET TETAP LAINNYA

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	IDENTITAS OBJEK BMD	
	Nama dan Jenis barang	Diisi sesuai dengan nama dan jenis barang pada buku inventaris
	Kode BMD	Diisi sesuai kodifikasi barang
	Tipe	Diisi dengan tipe barang
	Fisik	Diisi dengan ukuran barang
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan barang
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
2.	DATA PEROLEHAN *)	
	Nomor Surat Kontrak	Diisi dengan nomor kontrak/SPK/Kuintansi
	Tanggal Kontrak/Perolehan	Diisi dengan tanggal kontrak/SPK/Kuitansi
	Harga Kontrak/SPK/Kuitansi	Diisi dengan harga kontrak/SPK/Kuitansi per-satuan barang
	Jumlah Biaya Pendukung	Diisi dengan menjumlahkan semua biaya pendukung, sehingga barang tersebut siap digunakan seperti ATK, Foto Copy, Panitia, Biaya Lelang, dan lain-lain bila ada
	Jumlah Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan semua biaya pendukung
3.	DATA PENILAIAN ASET *)	
	Nama Bukti	Diisi dengan "Buku Inventaris SKPD A dengan nomor kode barang dan register dan lampiri copy data barang
	Harga Perolehan	Diisi sesuai dengan harga barang yang tipenya sama/sejenis
	Dasar Harga	Menggunakan harga barang sejenis/tipenya sama saat perolehan
4.	DATA PENILAIAN ASET TETAP LAINNYA KURANG DARI 9 TAHUN *)	
	Nilai Taksiran Biaya/Biaya Pembuatan Baru	Diisi dengan nilai "Biaya Pembelian Baru" yang diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud, maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar
	Depresiasi (10% x umur BMD)	Diisi dengan nilai depresiasi yaitu 10% dikali umur barang
	Nilai Aset (Pembelian Baru - depresiasi)	Diisi dengan mengurangi biaya pembelian baru dengan depresiasi
5.	DATA PENILAIAN ASET TETAP LAINNYA YANG LEBIH DARI 9 TAHUN DAN MASIH DIGUNAKAN *)	
	Nilai Taksiran / Biaya Pembelian Baru	Diisi dengan nilai "Biaya Pembelian Baru" yang diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud, maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang

		yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar
	Nilai Aset (total taksiran x 10%)	Diisi dengan mengalikan nilai total taksiran dengan 10%
6.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari Buku Inventaris
7.	FOTO BMD	Terlampir

Keterangan:

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka yang diisi nomor 2, sedangkan nomor 3, 4 dan 5 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan, maka yang diisi nomor 3, sedangkan nomor 2, 4 dan 5 tidak diisi.
3. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tidak terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan dan umur barang kurang dari 9 tahun, maka yang diisi nomor 4, sedangkan nomor 2, 3 dan 5 tidak diisi.
4. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tidak terdapat barang yang sejenis /setipe dengan tahun perolehan dan umur barang lebih dari 9 tahun, maka yang diisi nomor 5, sedangkan nomor 2, 3 dan 4 tidak diisi.
5. Khusus Hewan, Ternak, dan Tanaman, dinilai tanpa dilakukan depresiasi.

Mengetahui
Kepala SKPD....

Putussibau,20.....

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Dst..				

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR